

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Moch Septiawan Susilo
Susilo.septiawan@yahoo.com
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to analyze Good Corporate Governance factor (GCG) to the range of disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) at the company's annual report in Indonesia specifically the State-Owned Enterprises (BUMN) companies. The GCG variable is proxy by the size of board of commissioners, the proportion of board of independent commissioner, the managerial stock ownership, the concentrated stock ownership, the public stock ownership, the firm size and the leverage ratio. The result of this research shows that: (1) the size of board of commissioner variable has positive influence to the range of disclosure of Corporate Social Responsibility; (2) the proportion of independent board of commissioners does not have any positive influence to the range of disclosure of Corporate Social Responsibility; (3) managerial stock ownership does not have any positive influence to the range of disclosure of Corporate Social Responsibility; (4) concentrated stock ownership does not have any positive influence to the range of disclosure of Corporate Social Responsibility; (5) public stock ownership does not have any positive influence to the range of disclosure of Corporate Social Responsibility; (6) firm size does not have any positive; and (7) leverage ratio does not have any positive influence to the range of disclosure of Corporate Social Responsibility.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Board of Commissioners, Ownership Structure, size, and Leverage.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada Laporan Tahunan perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan BUMN. Variabel GCG penelitian di proksikan dengan ukuran Dewan Komisaris, proporsi Dewan Komisaris independen, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham terkonsentrasi, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan dan rasio *leverage*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (2) proporsi Dewan Komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (3) kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (4) kepemilikan saham terkonsentrasi tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (5) kepemilikan saham publik tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR; (6) ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif; dan (7) rasio *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, struktur kepemilikan, Size, dan Leverage.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. Sejak era reformasi bergulir, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru terhadap perusahaan tentang pentingnya melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) (Daniri, 2008). Selain itu, dorongan perusahaan untuk melaksanakan CSR adalah karena adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan."

Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Corporate Governance*, yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholders*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Said et.al. 2009).

Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan dituntut secara hukum untuk menerapkan prinsip GCG seperti yang tersirat dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) (2010) diantaranya: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan. Dijelaskan pada Pedoman Umum GCG Indonesia dalam Solihin (2008) khususnya prinsip responsibilitas, dimana pedoman tersebut dinyatakan bahwa perusahaan wajib mematuhi undang-undang dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga tercipta suatu *corporate citizenship*.

Berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan ekonomis dari shareholder ataupun alokasi atas investasi modal perusahaan lebih dari 2 persen dari laba yang dijadikan untuk implementasi program pengembangan masyarakat melalui bina lingkungan serta mitra usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *good corporate governance*, yang terdiri dari ukuran dewan komisari, proporsi dewan komisari independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan publik, *size* dan rasio *leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal jangka waktu pengambilan sampel yang lebih panjang yaitu antara 2010-2013 dan penambahan variabel dependen dalam GCG yaitu kepemilikan publik, nilai perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Penambahan periode pengamatan dan variabel dependen dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan hasil penelitian ini mempunyai daya komparabilitas yang lebih baik.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*), dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Masalah keagenan (*agency problem*) sebenarnya muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. *Corporate governance*, merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang berkaitan dengan bagaimana para investor memiliki keyakinan bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka serta manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan. Dengan kata lain, *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*). Teori Agensi juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan *principal* dapat dikurangi dengan mekanisme dan pengawasan yang dapat menyeleksi berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Ibrahim, 2007). Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Berbagai pemikiran mengenai GCG berkembang sekaligus mengacu pada *agency theory* dimana tata kelola perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa tata kelola tersebut dilakukan dengan kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2008:119). Hal ini menunjukkan bahwa manajer tidak selamanya bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan, di sisi lain sering pula terjadi para manajer bertindak untuk mengejar kepentingan mereka sendiri yang lebih menguntungkan.

Teori Stakeholder

Stakeholder menurut Gray (2001) adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Para *stakeholder* yang dimaksud antara lain adalah masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pasar modal, dan lain-lain. Ghazali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa dalam teori *stakeholder*, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya (pemegang saham kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Setiap *stakeholders* memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai pengaruh *stakeholders* terhadap organisasi, sekalipun *stakeholder* memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut ataupun *stakeholder* tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan organisasi (Deegan, 2000). Ratnasari dan Prastiwi (2010) menyatakan bahwa salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder*-nya adalah dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder (Clarkson, 1995). *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang sangat berpengaruh dalam perusahaan dan tanpa mereka perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi : pemegang saham dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 2001). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Ghozali dan Chariri, 2007). Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder*-nya adalah dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta dapat mengelola *stakeholder* agar mendapatkan dukungan oleh para *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan merupakan dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya dan menyediakan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mengubah persepsi dan ekspektasi (Gray *et al.*, 1995).

Teori Legitimasi

Menurut Deegan (2000:253), teori legitimasi meyakini suatu gagasan bahwa terdapat "kontrak sosial" antara organisasi dengan lingkungan dimana organisasi tersebut beroperasi. Konsep "kontrak sosial" digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit. Bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Pengungkapan pelaporan sosial dan lingkungan menjadi salah satu cara perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan investor. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan *image* dan pengakuan yang baik serta akan memiliki daya tarik dalam penanaman modal atau investor dalam negeri maupun asing.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance berasal dari suatu analogi antara pemerintahan suatu Negara atau kota dengan pemerintahan dalam suatu perusahaan (Becht *et al.*, 2002). Sebagaimana halnya pemerintahan dalam suatu negara yang melibatkan berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan berbeda untuk mencapai suatu tujuan. Hal tersebut berarti bahwa tanpa adanya *Corporate Governance* yang baik akan terjadi konflik kepentingan yang bias memberikan dampak buruk bagi kinerja perusahaan. *Corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur *Good Corporate Governance* menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Sutini dan Didin, 2010).

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance*. Pertama, keterbukaan (*transparency*) yaitu untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedua, akuntabilitas (*accountability*), adalah dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan

harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*), suatu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Keempat, Kewajaran (*fairness*), untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Kelima, Independensi (*independency*), dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Mekanisme Good Corporate Governance

Ada lima mekanisme *Corporate Governance* yang dipakai dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Saham Manajerial, Kepemilikan Saham Terkonsentrasi, Kepemilikan Saham Publik.

Dewan komisaris, sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang besar dipandang sebagai mekanisme *corporate governance* yang efektif.

Komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Independen Dewan Komisaris diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota Komisaris Independen dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris.

Kepemilikan saham manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung presentase (%) jumlah lembar saham yang dimiliki pihak manajemen yaitu manajer, komisaris terafiliasi (diluar komisaris independen) dan direksi dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar.

Kepemilikan saham terkonsentrasi merupakan kepemilikan saham yang sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok tertentu. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi apabila dalam perusahaan terdapat pemegang saham pengendali atau utama. Dimana kepemilikan saham tersebut besarnya lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan. Konsentrasi kepemilikan dapat meningkatkan tingkat keuntungan karena dengan terkonsentrasinya kepemilikan akan memberikan insentif pemegang saham untuk memonitor tindakan manajer guna memilih tindakan yang sesuai dengan kepentingan pemilik. Namun juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena menurunkan nilai perusahaan karena akan lebih mementingkan pemenuhan kesejahteraan lainnya.

Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Publik sendiri adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap beberapa aspek, yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Definisi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangatlah beragam, bergantung pada visi dan misi perusahaan yang disesuaikan dengan *needs, desire, wants*, dan *interest* komunitas. Berikut adalah beberapa definisi Tanggung Jawab Sosial :

“Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.” (The World Business Council for Sustainable Development.)

Sebagai adopsi atas konsep Tanggung Jawab Sosial, saat ini perusahaan secara sukarela menyusun laporan setiap tahun yang dikenal dengan Sustainability report. Laporan tersebut menguraikan dampak perusahaan terhadap tiga aspek, yakni dampak operasi perusahaan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.

Menurut Elkington (dalam Solihin, 2008: 30), perusahaan yang ingin menyusun sustainability report harus mengadopsi metode akuntansi *triple bottom line* yang merupakan perluasan dari konsep akuntansi tradisional yang hanya memuat bottom line tunggal yakni hasil-hasil keuangan dari aktivitas ekonomi perusahaan. Lebih lanjut, Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin memiliki keberlanjutan dalam berusaha haruslah memperhatikan “3P” *Planet, People, dan Profit*. Selain untuk mengejar laba (*Profit*) perusahaan juga harus memperhatikan pada kesejahteraan masyarakat (*People*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*).

Keterangan:

Profit (Keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Contoh: Beasiswa pendidikan dan sumbangan bencana alam.

People (Masyarakat)

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Contoh: Pengelolaan limbah dan kampanye lingkungan hidup.

Planet (Lingkungan)

Meningkatkan laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan tindakan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, namun tak kalah pentingnya memperhatikan kelestarian lingkungan, disinilah perlunya penerapan konsep *triple bottom line*. Contoh: Memperbanyak volume penjualan dan menekan biaya variabel

Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Meskipun cenderung menyederhanakan realitas, tipologi ini menggambarkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Pengkategorian dapat memotivasi perusahaan dalam mengembangkan program CSR, dan dapat pula dijadikan cermin dan *guideline* untuk menentukan model CSR yang tepat (Suharto, 2007).

Dengan menggunakan dua pendekatan, sedikitnya ada delapan kategori perusahaan. Perusahaan ideal memiliki kategori reformis dan progresif. Tentu saja dalam kenyataannya, kategori ini bisa saja saling bertautan.

Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR:

1. Perusahaan Minimalis. Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya termasuk kategori ini.
2. Perusahaan Ekonomis. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya rendah. Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah perusahaan besar, namun pelit.
3. Perusahaan Humanis. Meskipun profit perusahaan rendah, proporsi anggaran CSRnya relatif tinggi. Perusahaan pada katagori ini disebut perusahaan dermawan atau baik hati.
4. Perusahaan Reformis. Perusahaan ini memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan CSR

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Menurut Akhtaruddin et al. (2009), semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang besar dipandang sebagai mekanisme *corporate governance* yang efektif. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi CSR lebih banyak, sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR (Putra, 2011).

H1 : Ukuran Dewan komisaris berpengaruh positif pada luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan CSR

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi, yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan para pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen dipandang sebagai alat untuk memonitor perilaku manajemen Said et al, (2009), yang nantinya dapat menghasilkan lebih banyak informasi pengungkapan sukarela perusahaan. Said et al.(2009) menemukan bahwa semakin besar prosentase anggota independen yang ada pada dewan komisaris, akan meningkatkan aktivitas monitoring

terhadap kualitas pengungkapan keuangan dan mengurangi kepentingan dari kegiatan menutup-nutupi informasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diuji yaitu:

H2 : Komisaris Independen berpengaruh positif pada luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Luas Pengungkapan CSR

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham, yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Nugroho, 2008). Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan image perusahaan, semakin bagus image perusahaan maka harapannya Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diuji yaitu:

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif pada luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Pengaruh kepemilikan Saham Terkonsentrasi terhadap Luas pengungkapan CSR

Suatu perusahaan dikatakan terkonsentrasi apabila hak suara terbanyak dipegang oleh suatu institusi maupun perorangan. Menurut Ho dan Wong (2001), ketika proporsi saham dimiliki oleh segelintir pihak, maka konflik kepentingan yang terjadi bukanlah antara manajer dengan *shareholders*, melainkan antara *large shareholders* dengan *small shareholders*. Pada situasi yang demikian, manajer mendapat insentif untuk bertindak bertentangan dengan kepentingan *small shareholders* dengan cara mengurangi kualitas pengungkapan. Said et al. (2009) berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi mengakibatkan pemegang saham minoritas menjadi *powerless* untuk mencegah pemegang saham mayoritas dalam penerapan rencana mereka terhadap perusahaan. Hasil penelitian lain menurut Waryanto (2010) kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Semakin terkonsentrasi saham perusahaan kepada pemilik tertentu baik perorangan maupun kelompok, maka akan semakin luas tingkat pengungkapan CSR yang akan dilaporkan dalam laporan tahunan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kepemilikan Saham Terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Kepemilikan Publik (Public Ownership) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan akan semakin luas. Khan et al. (2012) menyebutkan bahwa ketika suatu perusahaan mulai *go public*, secara langsung akuntabilitasnya terhadap publik yang merupakan pemegang saham akan sangat diperlukan. Ada penekanan terhadap akuntabilitas akan menyebabkan perusahaan mengungkapkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan *visibility* dan *accountability* perusahaan terhadap sejumlah besar *stakeholder*. Untuk itu diperlukan keterlibatan perusahaan yang lebih dalam kegiatan sosial yang kemudian akan diungkapkan.

H5 : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Hubungan Rasio *Leverage* Perusahaan dengan Luas pengungkapan CSR

Perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi akan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial yang lebih luas (Hidayat, 2007). Alasan yang mendasari adalah perusahaan yang tinggi debt rasionya akan lebih mengungkapkan secara luas untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturnya. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan semakin besar pula *agency cost* atau dengan kata lain semakin besar kemungkinan terjadinya transfer kemakmuran dari kreditur jangka panjang kepada pemegang saham dan manajer, sehingga untuk mengurangi hal tersebut perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial yang luas guna memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjangnya.

H 6 : Terdapat pengaruh antara rasio *leverage* perusahaan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Hubungan Nilai Perusahaan dengan Luas pengungkapan CSR

Size perusahaan ikut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, semakin dikenal masyarakat yang berarti semakin mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan, karena perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung mendapat pengawasan dari masyarakat dan memiliki publik demand akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga akan mengungkapkan lebih banyak informasi (Sanjaya, 2015).

H 7 : Terdapat pengaruh antara nilai perusahaan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *probability sampling*, yaitu salah satu bentuk purposive sampling dengan memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

a. Dewan Komisaris

Diklasifikasikan dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan.

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan

b. Dewan Komisari Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}} \times 100\%$$

c. Kepemilikan saham manajerial

Tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{proporsi saham yang dimiliki manajemen}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

d. Kepemilikan saham terkonsentrasi

kepemilikan saham yang sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok tertentu. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi apabila dalam perusahaan terdapat pemegang saham pengendali atau utama.

$$\text{Konsentrasi kepemilikan} = \sum_{i=1}^n (\text{kepemilikan pemegang saham mayoritas})^2$$

e. Kepemilikan saham publik

proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Publik sendiri adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Putri, dalam Puspitasari, 2009).

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{proporsi saham yang dimiliki oleh publik}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Variabel Dependen**Pengungkapan CSR Perusahaan**

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y_1) berdasarkan check list yang pernah digunakan pada penelitian sayekti dan wondabio dengan menggunakan 7 aspek yaitu : Lingkungan, Energi, Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja, Lain-lain Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan masyarakat, Umum.

$$\text{CSD} = \frac{n}{k}$$

keterangan:

CSD = indeks pengungkapan perusahaan

n = jumlah item pengungkapan yang dipenuhi

k = jumlah semua item yang mungkin dipenuhi

Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol, yaitu *size* (total asset) dan *leverage*. Variabel kontrol adalah variabel yang dikontrol oleh peneliti, sehingga hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar yang diteliti.

Size

Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aktiva karena ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang tampak dalam nilai total asset perusahaan pada neraca akhir tahun.

Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$SIZE = \log (\text{nilai buku total aset})$$

Leverage

Leverage menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya. Selain itu, *leverage* juga memberikan gambaran tentang mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* adalah *Debt To Equity Ratio* (DER).

Adapun pengukuran dengan menggunakan rumus :

$$Leverage = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

Pengujian hipotesis

Hipotesis penelitian ini akan diuji dengan persamaan regresi berganda, yaitu :

$$CSD = \alpha_0 + \alpha_1 UDK + \alpha_2 KI + \alpha_3 KM + \alpha_4 KK + \alpha_5 KP + \alpha_6 TA + \alpha_7 LEV + e$$

Keterangan:

CSD = indeks pengungkapan perusahaan

UDK : Ukuran Dewan komisaris

KI : Komisaris Independen

KM : Kepemilikan Manajerial

KK : Konsentrasi Kepemilikan

KP : Kepemilikan Publik

SIZE : Proksi Ukuran Perusahaan (*ln* Total Aset)

LEV : Rasio Leverage (*Debt to Equity Ratio*)

e : *error*

Persamaan regresi berganda akan digunakan untuk menguji apakah *corporate governance* yang dalam penelitian ini adalah Ukuran Dewan Komisaris (UDK), Komisaris Independen (KI), Kepemilikan Terkonsentrasi (KK), Kepemilikan Publik (KP), *SIZE*, dan *Leverage* (LEV) berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

Untuk melihat kelayakan model dan menjelaskan apakah ada pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji F (uji kecocokan model). Jika uji F tidak signifikan, maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau uji parsial.

Sedangkan tehnik pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji t. Variabel independen dikatakan mempengaruhi variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis yang dirumuskan diterima apabila nilai signifikansi (α) yang dihasilkan kurang dari 5% (0.05) dengan tingkat kepercayaan 95%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian yaitu Ukuran Dewan Komisaris (UDK), Komisaris Independen (KI), Kepemilikan Terkonsentrasi (KK), Kepemilikan Publik (KP), *SIZE*, dan *Leverage* (LEV) berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility.

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
UDK	36	4.00	8.00	5.9167	1.02470
KI	36	.33	1.00	.5442	.18831
KM	36	.00	.00	.0000	.00000
KK	36	.28	.81	.4669	.16122
KP	36	.13	.98	.4186	.24355
LEV	36	.34	27.00	3.7775	5.18515
SIZE	36	11.10	14.80	13.4222	1.06613
CSR	36	.24	.72	.4692	.08604
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Menurut hasil statistik deskriptif tersebut dapat diketahui bahwa jumlah UDK terbanyak dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah dewan komisaris sebanyak 8 orang. Untuk ukuran KI Aneka Tambang (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen terbanyak yaitu sebanyak 1. Sedangkan untuk KM prosentase 0. Untuk KK prosentase terbesar adalah 81%, prosentase ini dimiliki oleh Kimia Farma (Persero) Tbk. Untuk prosentase KP terbesar adalah 98% dimiliki oleh Kimia Farma (Persero) Tbk. Untuk *Leverage* terbesar adalah 27 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk *SIZE* terbesar adalah 14,80 % dimiliki oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sedangkan CSR terbesar adalah 72% dimiliki oleh Aneka Tambang (Persero) Tbk dan Timah (Persero) Tbk.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas. Menunjukkan bahwa titik 0 titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik historisnya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas

b. Uji Multikolinearitas. Nilai tolerance semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi. Nilai DW hitung dengan nilai DW table telah diketahui bahwa DW hitung sebesar 2.321

d. Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik scatterplot. Hasil dari grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas atau menyebar, titik-titik penyebaran berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis

Persamaan regresi dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian, analisis regresi dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil seperti dalam tabel 2. Berdasarkan tabel 2, persamaan regresi yang dapat disusun adalah :

$$\text{CSD} = 0,783 + 0,078 \cdot \text{UDK} - 0,35 \cdot \text{KI} - 0,150 \cdot \text{KK} + 0,051 \cdot \text{KP} + 0,000 \cdot \text{KM} + 0,003 \cdot \text{LEV} - 0,054 \cdot \text{SIZE} + e$$

Tabel 2
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized			t	Sig.
	Coefficients		Standardized		
	B	Std. Error			
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.783	.327		2.396	.023
UDK	.078	.021	.930	3.745	.001
KI	-.035	.069	-.076	-.502	.619
KK	-.150	.126	-.282	-1.193	.243
KP	.051	.056	.146	.921	.364
LEV	.003	.003	.187	1.036	.309
SIZE	-.054	.027	-.665	-2.001	.055

a. Dependent Variable: CSD

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari hasil pengujian uji F (kecocokan model) dihasilkan nilai hitung F sebesar 3,997 dan signifikan pada 0,005. Dengan menggunakan tingkat α 0,05 atau 5% maka H_0 diterima. Penolakan H_0 dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai signifikansi (0,005) < dari $\alpha = 0,05$, dengan demikian bahwa model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen (SIZE, KP, KI, LEV, UDK, dan KK) terhadap variabel dependen (CSR). Sedangkan besar nilai adjusted R² sebesar 0,339 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 33,9%. Hal ini berarti 33,9% pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi variabel jumlah dewan komisaris. Jumlah komisaris independen, kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan publik, ukuran perusahaan (SIZE) dan *Leverage*. Sedangkan sisanya 66,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Standar *Error of the Estimate* (SEE) menunjukkan nilai 0,06993 hal ini menunjukkan nilai yang kecil sehingga dapat disimpulkan model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Angka signifikan variabel keberadaan ukuran dewan komisaris (UDK) sebesar 0,001, dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdaftar di BEI.

2. Angka signifikan komisaris independen (KI) sebesar 0,619, dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Angka signifikan kepemilikan konsentrasi (KK) sebesar 0,243, dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan konsentrasi tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdaftar di BEI.
4. Angka signifikan kepemilikan publik (KP) sebesar 0,364, dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan publik tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdaftar di BEI.
5. Angka signifikan variabel *leverage* sebesar 0,309, dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdaftar di BEI.
6. Angka signifikan variabel ukuran sebesar 0,055, dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdaftar di BEI.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: : 1. Faktor Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR, ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Faktor Ukuran Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR, hal ini karena komisaris independen tampaknya tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, sebab mereka tidak terlibat dalam operasional rutin perusahaan. 3. Faktor Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial yang relatif kecil. 4. Faktor Kepemilikan saham Publik tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR, Hal ini diduga karena kepemilikan saham publik merupakan gabungan dari seluruh saham-saham yang dimiliki masyarakat secara luas diluar institusional, manajerial, pemerintah, maupun asing, dan hanya memiliki hak minoritas sebagai stakeholder didalam suatu entitas. 5. Faktor Kepemilikan saham terkonsentrasi tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR, hal ini karena kepemilikan saham terkonsentrasi tidak dapat mengurangi masalah konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. 6. Faktor Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR, karena tidak ada ketentuan atas tindakan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan ekspektasi publik saat ini tanpa menghiribaukan apakah hal tersebut sudah diatur oleh hukum atau tidak. 7. Faktor *Leverage* perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR, karena perusahaan BUMN terdiri dari beberapa sektor, yakni keuangan dan non keuangan.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain :Jumlah sampel yang relative terbatas, hanya 9 yang memenuhi kriteria dari 22 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. 2. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini kurang terkonsentrasi

karena beragamnya sektor bisnis yang dijadikan objek dalam peneliti ini. 3. Terdapat unsur subjektifitas dalam menentukan indeks pengungkapan. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan baku yang dapat dijadikan standar atau acuan, sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori yang sama dapat berbeda untuk peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhataruddin, M. et.al. 2009. "Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reportsof Malaysian Listed Firms". *JAMAR*. Vol. 7. No. 1, hal. 1-20.
- Becht, M., Bolton, P. and Röell, A. "Corporate Governance and Control." Finance Working Paper 02 (2002), ECGI.
- Clarkson, M. 1995. "A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance." *Academy of Management Review*, Vol. 20 No. 1, pp.92-117.
- Daniri, M.A. 2008. Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Deegan, Craig. 2000. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Australia Pt Limited. Australia.
- Freeman, R.E. dan McVea, J. 2001. A Stakeholder Approach to Strategic Management. In Hitt, M., Freeman, R.E.
- Ghozali, I 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Gozali dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gray, R., et.al. 1995. *Corporate Social and environmental reporting: a review of the literature and longitudinal study of UK disclosure*. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8 No.2pp. 78-101.
- Gray, R. 2001. "Thirty Years of Social Accounting, Reporting, and Auditing: what (if anything) have we learnt?" *Business Ethics: A European Review*, Vol. 10, No.1, pp. 9-15.
- Hidayat, B, 2007. Pengaruh *Size, Profitabilitas, Profile* dan *Leverage* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2005). *Skripsi*. Universitas Riau.
- Ho, S.S.M., and Wong, K.S., (2001). A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 10, 1– 18.
- Ibrahim, M. 2007. *Pengaruh Sturktur Internal Governance terhadap Earning Manajemen*. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jansen, Michael C. Dan W.H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Constand Ownership Structure*. Juournal of Financial Economics 3.Hal 305-360.
- Khan, A, et.al. 2012. "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy". *Journal Business Ethics*. Vol. 114. No.2. Hal. 207-223.
- Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG). 2006. *PedomanUmum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Nugroho, A. 2008. "Pengaruh Implementasi Struktur Kepemilikan, Struktur *Good Corporate Governance*, dan Rasio Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI 2002-2006). *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Putra, E. N.. 2011. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.

- Ratnasari, Y dan A Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. 2010. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Dalam Sustainable Report*. Thesis Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Said, R, Y Zainuddin, dan H Haron. 2009. "The Relationship Between Corporate Social responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies". *Social Responsibility Journal*. Vol. 5, No. 2, Hal. 212-226.
- Sanjaya,oi., dkk. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI (20102011). <http://download.portalgaruda.org/article.php?article> Diakses tanggal 5 Februari 2015 (11.23).
- Sayekti, Y. Dan L.S. Wondabio. 2007. Pengaruh CSR Disclosure terhadap Earning Response Coefficient, *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Suharto, E. 2007. Corporate Social Responsibility : What is and Benefit for Corporate. <http://www.policy.hu/suharto>. Diakses tanggal 4 Oktober 2014 (13.27).
- Sutini dan D. Mukodim. 2010. *The Effect Implementation of Good Corporate Governance on Earning Managemen in Mining Company on The Indonesia Stock Exchange*. Undergraduate program Gunadarma Universitas.
- Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Waryanto. 2010 . *Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia* . Semarang.